

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Hasil penelitian yang dilaksanakan ini menyimpulkan bahwa persepsi korupsi berpengaruh negatif secara langsung tidak signifikan, terhadap partisipasi politik masyarakat dalam Pilpres Tahun 2019 di Sumatera Barat. Nilai pengaruh jalur persepsi korupsi terhadap partisipasi politik sebesar -0,030 dengan tingkat signifikansi (*P value*) sebesar 0,680 ($\alpha \geq 0,05$). Sedangkan kepuasan hidup berpengaruh positif secara langsung signifikan terhadap partisipasi politik masyarakat, dalam Pilpres Tahun 2019 di Sumatera Barat. Nilai pengaruh jalur kepuasan hidup terhadap partisipasi politik sebesar 0,280 dengan tingkat signifikansi (*P value*) *** $\leq 0,000$ ($\alpha < 0,05$). Adapun dua dari lima bentuk model partisipasi politik masyarakat Sumatera Barat dalam Pilpres Tahun 2019 yang diukur setelah dianalisis menggunakan Structural Equation Modeling (SEM), berhubungan negatif dengan persepsi korupsi dan berhubungan positif dengan kepuasan hidup.

Besarnya nilai pengaruh dari persepsi korupsi terhadap partisipasi politik yang diketahui adalah 1,7%, sedangkan besarnya nilai pengaruh kepuasan hidup terhadap partisipasi politik adalah 18,5%. Hasil penilaian partisipasi politik masyarakat Sumatera Barat dalam Pilpres Tahun 2019 menunjukkan nilai konversi sebesar 58 dengan deskripsi “cukup tinggi”. Penilaian terhadap persepsi korupsi menunjukkan nilai rata-rata 68 dengan deskripsi “tinggi”, dan kepuasan hidup yang menunjukkan nilai rata-rata 68 yang juga memiliki deskripsi “tinggi”. Angka-angka hasil pengukuran tersebut membuktikan bahwa masyarakat Sumatera Barat

mendapatkan pengaruh langsung negatif tidak signifikan dari persepsi korupsi, serta mendapatkan pengaruh langsung positif signifikan dari kepuasan hidup pada Pilpres Tahun 2019 yang diselenggarakan.

Ruang lingkup yang menjadi kajian dalam penelitian ini terbatas pada dua variabel besar dan semua indikator yang membangunnya masih sangat perlu ada kajian lanjutan. Untuk dapat menyempurnakan penelitian ini dalam mengukur tingkat partisipasi politik masyarakat agar dilaksanakan menggunakan variabel lain. Hal ini dikarenakan berdasarkan hasil analisis SEM yang dilakukan, ditemukan hasil bahwa indikator penegakan hukum atas kasus korupsi dari variabel persepsi korupsi telah gugur dieliminasi.

Indikator-indikator yang gugur berdasarkan hasil analisis SEM tersebut dihipotesiskan sebagai pembentuk dari variabel kepercayaan politik. Sehingga, penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan memperhatikan indikator-indikator yang sudah digunakan namun gugur berdasarkan hasil analisis SEM dalam penelitian ini dan tidak menggunakannya dalam penelitian selanjutnya. Peneliti selanjutnya dapat lebih mendalami permasalahan mengenai tingkat partisipasi politik dengan kondisi daerah yang sangat beragam dan unik, maka perlu disesuaikan rumusan indikator dari model yang diajukan dengan keadaan daerah setempat.

Implikasi teoritis hasil penelitian ini terhadap partisipasi politik adalah, persepsi korupsi memiliki pengaruh yang negatif tidak signifikan terhadap partisipasi politik dalam Pilpres, sedangkan kepuasan hidup masyarakat memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap partisipasi politik dalam Pilpres. Persepsi korupsi yang tinggi mempengaruhi secara negatif tidak signifikan dua dari lima

bentuk model partisipasi politik masyarakat Sumatera Barat dalam Pilpres Tahun 2019. Sedangkan kepuasan hidup yang tinggi juga mempengaruhi secara positif signifikan dua dari lima bentuk model partisipasi politik masyarakat Sumatera Barat dalam Pilpres Tahun 2019.

Masyarakat akan berpartisipasi politik serta dapat mengalami peningkatan khususnya dalam pemilu diselenggarakan seperti Pilpres, ketika para kandidat yang mencalonkan diri terbebas dari persoalan korupsi. Artinya para kandidat yang maju dalam pemilu dituntut untuk mampu menerapkan sikap serta prinsip demokratis seperti transparan, akuntabel, serta responsif terhadap aspirasi dari masyarakat. Disamping itu para kandidat yang ada juga diminta untuk mampu meningkatkan kepuasan hidup yang dimiliki masyarakat, dengan cara memberikan pelayanan serta kinerja terbaik ketika telah mempunyai kekuasaan pemerintahan yang diperoleh dari hasil pemilu yang diselenggarakan.

6.2 Saran

Penelitian ini terbatas pada pembahasan tentang pemodelan partisipasi politik masyarakat Sumatera Barat dalam Pilpres Tahun 2019, dengan menggunakan teknik analisis *Structural Equation Modeling/ SEM*. Sedangkan 2 variabel *independent* (bebas) yang digunakan untuk menganalisis partisipasi politik sebagai variabel *dependent* (terikat), yakni: persepsi korupsi (X1) dan kepuasan hidup (X2). Beberapa saran akademis untuk penelitian selanjutnya adalah: Pertama, agar dilakukan penambahan variabel lain untuk mengkaji bahasan mengenai model partisipasi politik masyarakat Sumatera Barat, seperti: kepercayaan politik masyarakat terhadap pemerintah, serta dilakukan penyesuaian indikator partisipasi politik yang dibangun dengan berdasarkan pada aspek kebudayaan lokal.



Kedua, melakukan penelitian lanjutan untuk mengukur partisipasi politik dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif. Penelitian selanjutnya dapat mengisi kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini, yakni: belum mampu menjelaskan kenapa faktor kepuasan hidup yang tinggi kepada petahana tidak mampu meyakinkan masyarakat selaku pemilih, untuk kembali memilih kandidat petahana yang maju dalam pemilihan. Hal ini dikarenakan pendekatan secara kuantitatif hanya menghasilkan ukuran secara matematis semata, dan digeneralisir menurut penilaian yang diberikan oleh individu masyarakat.

Saran praktis yang dapat peneliti berikan berkaitan dengan penelitian ini, yaitu: Pertama, untuk dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat maka para kandidat yang maju dalam pemilu agar dapat lebih menerapkan prinsip-prinsip demokrasi seperti: transparansi, akuntabilitas, serta tanggung jawab terutama bila telah pernah memegang kekuasaan pemerintahan. Transparansi, akuntabilitas, serta tanggung jawab yang tinggi dihipotesiskan mampu menimbulkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan efikasi politik masyarakat kepada para kandidat. Kedua, agar lebih memperhatikan faktor kepuasan hidup masyarakat dalam setiap keputusan ataupun kebijakan politik yang dipilih, karena terbukti memiliki pengaruh positif signifikan terhadap partisipasi politik masyarakat.

